

# *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Ekowisata Mangrove Di Desa Pangkalan Jambi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis

<sup>1</sup>Veronica Putri Sevial, <sup>2</sup>Zulkarnaini

<sup>1,2</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Riau

Korespondensi : veronicaputrisevial22@gmail.com

## **Abstrak**

*Collaborative Governance* adalah suatu hal penting dilakukan dalam kegiatan pengembangan ekowisata mangrove, jika tidak kerjasama antar kelompok atau aktor yang berkepentingan akan sulit mencapai perkembangan yang signifikan. Oleh sebab itu tujuan dibuatnya penelitian ini ialah untuk menganalisis kolaborasi aktor dan faktor penghambat dalam pengembangan ekowisata mangrove yang ada di Desa Pangkalan Jambi, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dalam menganalisis kolaborasi aktor peneliti menggunakan teori Ansell & Gash, kolaborasi dinilai melalui kegiatan dialog tatap muka, pemahaman bersama, komitmen dalam kolaborasi, membangun kepercayaan, dan hasil sementara. Kolaborasi aktor dalam pengembangan ekowisata mangrove di Desa Pangkalan Jambi ini belum efektif dimana para pemangku kepentingan melakukan dialog tatap muka masih belum terjadwal dengan baik, kegiatan dialog pun jarang mendudukkan seluruh aktor yang berkepentingan maupun yang berperan secara bersama-sama. Meski kolaborasi sudah ada upaya kegiatan membangun kepercayaan para pemangku kepentingan dalam mengembangkan ekowisata. Semua kegiatan itu terhambat karena beberapa hal seperti tidak adanya dialog yang terjadwal dengan menghadirkan seluruh pihak berkepentingan, serta tidak berjalan dengan baik komitmen antar aktor.

**Kata kunci:** *Collaborative Governance, Pengembangan, Ekowisata Mangrove.*

## **Abstract**

*Collaborative Governance* is an important thing to do in mangrove ecotourism development activities, otherwise cooperation between interested groups or actors will be difficult to achieve significant development. Therefore, the purpose of this research is to analyze the collaboration of actors and inhibiting factors in the development of mangrove ecotourism in Pangkalan Jambi Village, Bukit Batu District, Bengkalis Regency. The method used is a qualitative method with a phenomenological approach. In analyzing actor collaboration, researchers used Ansell & Gash's theory, collaboration is assessed through face-to-face dialogue activities, mutual understanding, commitment in collaboration, building trust, and interim results. Actor collaboration in the development of mangrove ecotourism in Pangkalan Jambi Village has not been effective where stakeholders conduct face-to-face dialogues that are still not well scheduled, dialogue activities rarely sit all actors with an interest or role together. Although collaboration there have been efforts to build trust among stakeholders in developing ecotourism. All of these activities are hampered by several things such as the absence of scheduled dialogues by presenting all interested parties, and the commitment between actors does not work well.

**Keyword:** *Collaborative Governance, Development, Mangrove Ecotourism.*

## **1. PENDAHULUAN**

Ekowisata menjadi salah satu kegiatan pariwisata guna menjaga kelestarian hutan mangrove sekaligus memberi edukasi kepada masyarakat dengan penerapan konsep eduwisata. Ekowisata mangrove yang memiliki nama eko dan wisata, dimana didalamnya terdapat perpaduan kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian sekaligus menambah wawasan dalam hal pariwisatanya terutama terhadap tanaman mangrove dan hutan mangrove. Hutan mangrove dominan berada di daerah pesisir karena berperan dalam melindungi pantai dari abrasi, intrusi air laut, menahan lumpur, dan juga memerangkap

sedimen. Ekowisata adalah salah satu strategi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di daerah pesisir. (Riadhussyah *et al.*, 2021).

Riau menjadi salah satu daerah yang terdapat daerah pesisir, itu menandakan Riau memiliki hutan mangrove yang dapat dijadikan ekowisata. Hal itu tampak dari Laporan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau pada tahun 2021 menyebutkan bahwa luas mangrove di Provinsi Riau mencapai 224.895 hektar, meningkat sebesar 5.050 hektar dari tahun 2020. Salah satu daerah pesisir tersebut yaitu Kabupaten Bengkalis. Letak wilayah yang dekat dengan Selat Malaka juga membuat Bengkalis memiliki wilayah daerah yang tergolong daerah Pesisir. Kabupaten Bengkalis sendiri juga terdapat desa yang langsung bersentuhan dengan daerah pesisir, Desa tersebut ialah Desa Pangkalan Jambi.

Secara luas desa ini didominasi oleh wilayah perairan, perkebunan dan pertanian. Potensi terjadinya abrasi berpeluang besar pada desa ini, karena berdekatan dengan laut. Didalam Mongabay situs berita lingkungan, dikatakan bahwa “terjadi abrasi yang mengakibatkan di pesisir desa dan membuat masyarakat harus mencari pemukiman baru yang jauh dari bibir pantai, agar terhindar dari gelombang air laut”. Dulunya desa ini sudah terdapat mangrove tetapi karena tidak adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya mangrove membuat tumbuhan mangrove dirusak lalu di tebang dan membuat masyarakat harus berpindah untuk menghindari abrasi yang terjadi di Desa tersebut. Maka itu perlu adanya pengelolaan mangrove dengan baik salah satunya dijadikan ekowisata mangrove.

Pada tahun 2004 petani dan nelayan yang lebih dikenal dengan kelompok Harapan Bersama yang berada di Desa Pangkalan Jambi tergerak untuk melakukan penanaman dan pengelolaan mangrove agar dapat mengurangi abrasi yang sangat kuat terjadi dan dapat merusak lingkungan tempat mereka tinggal. Dari keterbatasan pengetahuan terhadap pengelolaan mangrove tersebut kelompok Harapan Bersama selalu berusaha menemui solusi dari kegagalan mereka dalam kegiatan penanaman mangrove tersebut. Namun sekitar tahun 2017 pihak swasta mulai masuk dan membantu kelompok Harapan Bersama. Setelah kolaborasi antara kelompok tani dan pihak swasta mulai berhasil, masyarakat bersama dengan pihak swasta mulai membuat ekowisata mangrove pada tahun 2018 sampai menjadi MEC (*Mangrove Education Center*) seperti sekarang ini.

Kondisi ekosistem mangrove pada Desa Pangkalan Jambi ini tergolong alami, membuat ekowisata ini wajib dikunjungi oleh wisatawan untuk menikmati sensasi hutan bakau. Selain menikmati sensasi hutan bakau yang alami masyarakat juga dapat belajar mengenai flora dan fauna karena ekowisata yang menerapkan konsep eduwisata. Pada ekowisata ini terdapat pula kolam ikan air payau, tidak hanya itu pada ekowisata mangrove yang ada di Desa Pangkalan Jambi ini juga ada, ibu-ibu yang mengolah hasil laut maupun hasil mangrove yang ada pada ekowisata tersebut. Produk yang dihasilkan terdiri dari amplang lomek, kripik jeruju, dodol kedabu, sirip kedabu hingga dodol kedabu. Potensi yang ada pada ekowisata ini sangat besar. Selain itu, komposisi jenis ekosistem yang ada di ekowisata mangrove Desa Pangkalan Jambi sangat beragam dan itu perlu di jaga. Tetapi dengan seiringnya waktu terjadi kemunduran pada ekowisata ini, yang menyebabkan produktivitas pengunjung untuk berkunjung menurun.

Untuk menciptakan dan mengelola ekowisata yang berkembang tersebut peran beberapa aktor utama sangat dibutuhkan dalam kolaborasi. Pelaku atau lebih dikenal sebagai aktor dalam kegiatan kolaborasi tersebut memiliki peran masing masing. Duverger mengatakan bahwa “peran” adalah perilaku yang ada pada masyarakat dimana dia bertempat untuk hidup, maka dia ialah seorang aktor yang harus memainkan berbagai macam peranan seperti aktor-aktor profesional (Iswanti & Zulkarnaini, 2022) . MEC atau Mangrove Education Center di Desa Pangkalan Jambi menjadi pahlawan untuk menahan abrasi pada desa dan perlu untuk dikembangkan. Apalagi desa Pangkalan Jambi yang menjadi pilot projek ekowisata mangrove yang terbukti dari Prokopim Kabupaten Bengkalis menyebutkan bahwa *Mangrove Education Center* akan menjadi refensi nasional. Jika ekowisata mangrove tersebut dikatakan menjadi referensi nasional maka sarana dan prasarana terjaga dengan baik, tetapi hal itu tidak terjadi di lapangan.

Kondisi MEC sekarang ini sangat memprihatinkan karena terdapatnya trek jalan dan WC yang sudah tidak memadai lagi. Dari kondisi ekowisata yang tidak memadai tersebut menyebabkan ekowisata tidak dapat membuka ekowisata untuk wisatawan. Lalu tidak terdapat aktifitas penarikan karcis bagi pengunjung. Fenomena itu sangat disayangkan, mengingat kolaborasi aktor masih terus berjalan. Itu terbukti dari gambar dibawah ini



Sumber: Kelompok Pengelola

Gambar diatas dapat memperlihatkan salah satu masalah yang perlu ditangani oleh setiap aktor yang berkepentingan. Itu juga membuktikan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan perlu untuk di tingkatkan dalam pengembangan ekowisata mangrove di Desa Pangkalan Jambi. Jumlah pengunjung menurun drastis setiap tahunnya disebabkan bencana Covid-19 yang menimpa seluruh daerah di Indonesia. Dampak dari Covid tersebut membuat para kelompok tani harus memutar otak untuk dapat menarik wisatawan dengan kondisi wisata yang sudah mulai kurang membaik. Kondisi terkini ekowisata mangrove yang ada di Desa Pangkalan Jambi tersebut juga kurang membaik seperti, trek jalan yang sudah rusak bahkan terputus lalu kondisi WC yang kurang baik untuk digunakan bila ada wisatawan yang datang untuk berkunjung. Dari adanya peristiwa trek ekowisata yang terputus tersebut terlihat bahwa kurangnya pengawasan yang dilakukan pemangku kepentingan terhadap pengembangan ekowisata.

Selain itu penurunan kunjungan jumlah wisatawan juga terjadi dikarenakan ekowisata yang tidak memadai. Dari tidak baiknya kondisi sarana prasarana tersebut mengharuskan pengelola untuk menutup kunjungan dari wisatawan. Itu tampak pada grafik jumlah wisatawan di bawah ini :



Pada grafik di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat kestabilan jumlah pengunjung pada ekowisata, hal tersebut mengurangi produktifitas dari ekowisata mangrove Desa Pangkalan Jambi itu sendiri. Tahun 2019 wisatawan banyak berkunjung, lalu pada tahun 2020 ekowisata hanya membuka wisata sampai dengan pertengahan tahun yakni bulan April. Pada tahun 2021 MEC di tutup sementara waktu karena terjadi peristiwa Covid-19, serta terdapat surat edaran bahwa tempat wisata yang ada di Desa Pangkalan Jambi ini harus ditutup sementara waktu. Sewaktu Covid-19 sudah mulai reda para pemangku kepentingan harus berupaya dalam menarik pengunjung datang berwisata, tetapi tampak bahwa wisatawan semakin menurun dengan drastis. Hal itu sangat di sayangkan, seharusnya dengan ekowisata yang masih baru tersebut harus di kembangkan dengan baik dan mendatangkan banyak wisatawan.

Lalu pada tahun 2022 ekowisata mulai bangkit tetapi pada pertengahan tahun pula, sekitaran juni 2022 ekowisata di haruskan tutup dan tidak dapat menerima wisatawan kembali di karena kondisi trek yang terputus. Begitu pula tahun 2023-2024 tidak terdapat satu pun pengunjung, hal ini disebabkan oleh fasilitas trek jalan yang masih rusak, sehingga pengelola harus menutup kegiatan penarikan karcis pada ekowisata ataupun eduwisata, berarti jika tidak ada wisatawan maka juga tidak ada penarikan tiket masuk wisata. Dapat dikatakan bahwa tidak adanya peningkatan produktivitas ekowisata baik dari segi pengunjung, maupun pergerakan perekonomian.

Jumlah pengunjung yang terus menurun tersebut harus diatasi dengan meningkatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Hal itu harus dikelola dan membutuhkan kolaborasi untuk menciptakan kebijakan pengembangan ekowisata mangrove yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Itu sejalan dengan kebijakan daerah pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah memberikan peluang bagi daerah untuk mengembangkan potensi daerah.

Aktor yang terlibat pada kolaborasi ini terdiri dari tiga aktor penting, antara lain Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat. Hal itu penulis lakukan karena aktor tersebut merupakan pemangku kepentingan yang benar benar terlibat. Jika tidak ditanggulangi akan menurunkan produktifitas ekowisata seperti, tidak ada hasil atau dampak sementara dari hasil kolaborasi yang sudah dilakukan, lalu pendapatan masyarakat yang menjadi UMKM pada ekowisata menurun, kondisi ekowisata yang akan semakin memburuk, serta produk olahan mangrove yang ada di ekowisata tersebut tidak dapat terjual kepada wisatawan.

Perlu adanya kerjasama yang baik dalam pengelolaan ekowisata pada Desa Pangkalan Jambi ini, perangkat Kecamatan Bukit Batu sekaligus perangkat Desa Pangkalan Jambi menjadi perwakilan Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis tersebut harus bergerak cepat untuk memajukan sektor wisata terutama *Mangrove Education Center* yang ada pada daerah mereka. Upaya *collaborative governance* dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang terjadi pada pengembangan ekowisata mangrove yang ada di Desa Pangkalan Jambi. Terdapat permasalahan dalam kegiatan kolaborasi tersebut, seperti kurangnya pengawasan yang dapat menurunkan produktifitas ekowisata mangrove itu sendiri. Oleh karena itu tujuan penulis ingin melihat kolaborasi aktor dalam pengembangan ekowisata mangrove agar sesuai dengan Perda Kabupaten Bengkalis No 2 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2035, pasal 11 “terwujudnya ketersediaan dan pelayanan fasilitas pariwisata prasarana umum dan fasilitas umum pendukung pariwisata”.

## 2. METODE

Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan fenomenologi merupakan metode yang digunakan pada penelitian ini. Pendekatan ini kberhubungan dengan kejadian atau fenomena dari *collaborative governance* untuk pengembangan ekowisata, dari penggunaan metode kualitatif akan menjawab permasalahan dengan komperhensif lalu eligible. Untuk mendukung metode serta pendekatan ini

penulis menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara, dokumentasi serta observasi. Pengumpulan data yang penulis lakukan didukung dengan teknik analisis data menurut Creswell (2018) yang penulis gunakan, dimana teknis analisis data tersebut terdiri dari beberapa kegiatan seperti menyiapkan data, validasi data dengan triangulasi data, pengkodean data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan teknik analisis data yang dapat melihat *collaborative governance* dalam pengembangan ekowisata mangrove di Desa Pangkalan Jambi, Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Informan menjadi sumber data penulis.

Informan ini terdiri dari aktor yang terlibat dalam pengembangan ekowisata mangrove yakni Pemerintah Desa, Swasta, Masyarakat serta Pengelola ekowisata. Dalam menentukan informan ini penulis menggunakan teknik *Purposive*. *Purposive* merupakan teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini penulis imbangin dengan menerapkan teknik *serial selection of sample units* penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan Teori Ansell and Gash (Yusri *et al.*, 2022). Teori ini akan melihat berbagai interaksi antar aktor dalam menentukan perencanaan sampai dengan *output* kolaborasi untuk menciptakan manfaat yang dapat berdampak pada masyarakat setempat hasil. *Collaborative governance* akan dinilai melalui lima indikator penting dalam kegiatan kolaborasi yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen dalam kolaborasi, pemahaman bersama dan hasil sementara.

#### **Dialog Tatap Muka (*Face To Face Dialog*)**

Dialog tatap muka merupakan kegiatan penting untuk mewujudkan suatu pengembangan, dari kegiatan dialog tatap muka tersebut semua pihak yang terlibat dapat memberikan masukan atau saling melakukan interaksi yang dapat memberikan hasil yang maksimal terhadap suatu perencanaan. Dialog tatap muka menjadi langkah awal yang terpenting untuk bisa melalui proses membangun pemahaman bersama, kepercayaan, dan adanya hasil dari kolaborasi antar aktor tersebut.

Komunikasi dua arah atau lebih dikenal dengan dialog tatap muka pada teori ini akan menciptakan keputusan bersama dan pembagian tanggung jawab yang jelas dari masing masing aktor yang terlibat. Sama halnya dengan aktor yang bekerja sama dalam pengembangan ekowisata mangrove, mereka melakukan dialog tatap muka dengan berwujudkan suatu kegiatan rapat atau diskusi bersama.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dalam menilai dialog tatap muka untuk pengembangan ekowisata mangrove di Desa Pangkalan Jambi belum terlalu efektif. Seluruh aktor memang sudah melakukan kegiatan dialog tatap muka baik secara formal maupun informal tetapi semua itu harus terjadwal. Serta kegiatan dialog tatap muka yang melibatkan seluruh komponen harus dilakukan dengan terjadwal. Itu menjadi salah satu kunci untuk terwujudnya komunikasi yang maksimal. Pemerintah Desa serta Pemerintah tingkat Kecamatan ada melakukan kegiatan dialog, tetapi para aktor tersebut tidak melakukan secara bersama-sama. Hanya antara Pemerintah Kecamatan bersama dengan pengelola ekowisata. Begitu pula dengan pengelola ekowisata, para kelompok ada melakukan kegiatan dialog sesama kelompok. Lalu untuk dialog antara pengelola serta pihak swasta ada dilakukan. Meski dialog tatap muka ada dilakukan tetapi tidak melibatkan seluruh aktor secara teratur.

Jika dialog tatap muka tersebut tidak dilakukan dengan maksimal dan diatur maka kolaborasi antar aktor tidak dapat berjalan dengan baik. Indikator kolaborasi aktor yang pertama ini harus dilakukan dengan sistematis yang terstruktur. Dari hasil wawancara yang sudah dijabarkan diatas dapat penulis simpulkan bahwa seluruh aktor sudah berusaha melakukan kegiatan dialog meski terkadang di atas Para

aktor harus menjadwalkan dialog tatap muka untuk dapat mengevaluasi setiap tindakan yang sudah dilakukan dalam pengembangan ekowisata mangrove.

### **Membangun kepercayaan (*Trust Building*)**

Kepercayaan menjadi bagian yang tidak boleh dilupakan untuk setiap kegiatan kolaborasi aktor. Indikator ini sendiri dapat menciptakan suatu kegiatan pengelolaan dan pengembangan yang baik, termasuk pengembangan ekowisata mangrove. Jika kepercayaan dapat tercipta dengan baik maka kata solid akan ditemukan dalam kolaborasi antar aktor. Kepercayaan juga menjadi tonggak awal mulainya kolaborasi, karena dari tumbuhnya rasa percaya tersebut akan terwujud pemahaman serta akuntabilitas kolaborasi.

Menilai dari hasil penelitian yang penulis lakukan dalam proses kolaborasi pengembangan ekowisata mangrove Desa Pangkalan Jambi sudah diupayakan oleh seluruh aktor atau pemangku kepentingan yang terlibat. Salah satu upaya membangun kepercayaan dilakukan oleh swasta yaitu PT. Kilang Pertamina International RU II Sungai Pakning melalui ajakan edukasi dalam bentuk pelatihan yang diberikan kepada pengelolaan ekowisata serta program pemberdayaan masyarakat. Meski PT. Kilang Pertamina International RU II Sungai Pakning sudah melakukan hal tersebut kondisi ekowisata masih terjadi kerusakan pada trek jalan yang terputus. Selain itu membangun kepercayaan juga dilakukan oleh Pemerintah Desa Pangkalan Jambi yaitu dengan mendukung berbagai program pengembangan ekowisata melalui pengawasan untuk pembangunan ekowisata mangrove. Sedangkan upaya membangun kepercayaan yang dilakukan pengelola yang terdiri dari kelompok harapan bersama serta kelompok jaya bersama melalui melaksanakan pengembangan serta kebijakan yang sudah disepakati bersama. Para kelompok menjaga kelestarian serta kebersihan ekowisata.

Masyarakat juga melakukan upaya membangun kepercayaan dengan tidak melakukan penebangan pohon mangrove dan tidak melakukan penebangan liar pada mangrove yang sudah dirawat secara bersama sama. Meskipun pada awalnya masyarakat masih belum terlalu paham akan penting mangrove untuk menjaga Desa dari abrasi.

### **Komitmen Dalam Proses (*Commitment To Process*)**

Komitmen adalah suatu bentuk kesepakatan, dimana akan menjadi cikal bakal keberhasilan suatu kolaborasi. Komitmen ini terbentuk adanya kepercayaan diantara setiap aktor, karena komitmen akan mengikat setiap aktor untuk mau bekerja sesuai dengan hasil musyawarah bersama. Jika akan melakukan kegiatan kolaborasi ini, diperlukan inisiatif dari setiap aktor, para pemangku kepentingan. Lalu aktor tersebut harus terus berperan aktif seiring proses kerjasama berjalan sampai dengan tercapainya tujuan yang sudah bersama sama disepakati. Komitmen akan proses kolaborasi pengembangan ekowisata ada dijalankan oleh masing-masing pihak meski hal itu belum berjalan dengan baik. Penulis menilai komitmen yang dilakukan oleh setiap aktor masih belum berjalan dengan baik, ditandai dengan tidak adanya visi misi yang menjadi pengikat setiap aktor untuk berkomitmen dalam pengembangan ekowisata.

Pemerintah desa berkomitmen untuk terus mempromosikan ekowisata mangrove menjadi icon dari Desa Pangkalan Jambi. Bukan hanya menjadi icon Desa Pangkalan Jambi tetapi hasil olahannya sampai memiliki tempat dan fasilitas yang lebih beragam lagi salah satunya seperti sang saung tempat penginapan. Oleh karena Pemerintah Desa selalu mensupport pengelola dalam mengembangkan ekowisata. begitu pula dengan masyarakat dan pengelola berkomitmen untuk menjaga kelestarian dari ekowisata mangrove

Komitmen dalam proses tersebut sudah dilakukan oleh masing masing aktor yang memiliki tanggung jawab terhadap ekowisata, tetapi komitmen itu hanya dilakukan sesuai dengan prinsip dan peran masing masing tanpa adanya MoU dan visi misi yang jelas dan tertuang dalam satu dokumen MoU. Walaupun belum tertuang dalam MoU, para aktor sudah memiliki kesadaran dalam melaksanakan dan bersinergi membangun Desa Pangkalan Jambi untuk kebermanfaatannya bagi alam dan penduduk setempat.

### **Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*)**

Pemahaman bersama menjadi dasar penting untuk menciptakan hasil yang maksimal. Setiap pihak yang terlibat harus memiliki visi dan misi yang jelas untuk pengembangan ekowisata. Visi misi menjadi dasar dimana sudah mencakup pemahaman bersama serta komitmen bersama dalam pengembangan. Pasti setiap pihak yang berkepentingan tersebut memiliki cara yang berbeda tetapi masih memiliki tujuan yang sama yaitu untuk pengembangan. Seluruh aktor yang terlibat juga menerapkan nilai gotong royong serta kerjasama untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekowisata mangrove Desa Pangkalan Jambi.

Meski memiliki kebersamaan nilai tersebut belum terdapat visi misi yang jelas, visi misi tersebut menjadi bentuk serta wujud pemahaman bersama dari masing masing aktor. Hal itu disebabkan oleh berbagai hal salah satunya minimnya komunikasi yang menduduk aktor secara bersama dalam satu forum untuk menciptakan suatu pengikat serta penanda kolaborasi memiliki pemahaman bersama dalam melaksanakan pengembangan ekowisata mangrove yaitu berupa visi misi. Jika terdapat visi misi yang jelas ini akan memudahkan pemangku kepentingan dalam menjalankan peran masing-masing untuk menjaga serta memprioritaskan pengelolaan sarana dan prasarana yang memerlukan perhatian yang besar. minimnya perhatian terhadap sarana dan prasarana seperti trek jalan yang terputus tersebut didorong oleh tantangan berupa minimnya anggaran perbaikan sarana dan prasarana.

Maka perlu suatu pemahaman bersama dalam menyatukan perbedaan pemikiran tersebut. Menurut Dorisman pemahaman bersama menjadi penyelarasan nilai-nilai dan penyelarasan terhadap cara mendefinisikan suatu permasalahan, itu menjadi hal penting (Dorisman et al., 2021). Sama halnya, penting untuk setiap pemangku kepentingan dalam pengembangan ekowisata yang ada di Desa Pangkalan Jambi ini.

### **Hasil Kecil (*Intermediate Outcome*)**

Hasil sementara menjadi hal yang signifikan dari suatu kolaborasi, kolaborasi cenderung dikatakan sukses jika menghasilkan dampak yang baik meski hanya baru dirasakan sedikit keberhasilan atau awal keberhasilan. Hasil kecil yang dimaksud pada penelitian ini mengacu pada kemenangan kecil yang dirasakan dari kolaborasi yang sudah dilakukan. Hasil kolaborasi ini bisa berdampak baik atau kurang baik tergantung masing – masing aktor yang melakukan kegiatan kolaborasi. Siklus dari terwujudnya hasil kecil yang baik ini tercipta dari setiap indikator membangun kepercayaan, komitmen yang tercipta serta pemahaman yang baik antar pemangku kepentingan.

Hasil sementara ini tercipta dari perencanaan startegis dalam mengembangkan ekowisata mangrove. Perencanaan yang dilakukan oleh aktor tersebut peneliti menyimpulkan masih belum maksimal. Itu terbukti dari tidak adanya penarikan tiket masuk untuk wistawan serta tidak ada UMKM yang dapat berjualan lagi pada ekowisata tersebut beberapa tahun kebelakang. Mengingat pada tahun 2019 ekowisata terdapat masyarakat yang berjualan untuk menambah penghasilan mereka serta adanya penarikan tiket masuk ekowisata. Maka dibutuhkan perencanaan yang baik dan koordinasi yang baik pula antara Pemerintah Desa, Swasta, Pengelola serta masyarakat setempat. Meski belum mendapat dampak yang maksimal kelompok pengelola serta masyarakat sudah merasakan sedikit dampak positif seperti, berkurangnya bencana abrasi di Desa, terdapat produk olahan hasil ekowisata yang menjadi icon Desa Pangkalan Jambi.

## **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian serta observasi yang sudah peneliti lakukan di lapangan peneliti menarik kesimpulan bahwa collaborative governance dalam pengembangan ekowisata mangrove di Desa Pangkalan Jambi yang sudah dilakukan oleh pihak yang berkepentingan seperti Pemerintah, swasta dan

masyarakat masih belum berjalan dengan baik. Hal itu tampak pada dialog tatap muka yang masih belum terjadwal dengan baik, lalu dialog tatap muka yang jarang mendudukkan seluruh pihak yang berkepentingan guna diskusi untuk menentukan tujuan pengembangan secara bersama-sama. Upaya membangun kepercayaan sudah dilakukan dari pemangku kepentingan untuk mewujudkan pengembangan ekowisata mangrove. Komitmen bersama pun sudah tampak dari masing-masing aktor, meski belum terdapat visi misi yang jelas sebagai pengikat dari komitmen antar aktor untuk bertanggung jawab dengan tugas dan perannya masing-masing.

Selain komitmen bersama indikator penilaian pemahaman bersama masih kurang maksimal terlaksana, dikarenakan visi misi yang tidak tertuang dengan baik, hanya melalui perbincangan dari masing-masing aktor. Sama halnya dengan hasil sementara. Hasil dari ekowisata ini sudah mulai dirasakan seperti bencana abrasi yang tidak melanda Desa, lalu produk andalan mangrove yang menjadi icon ekowisata serta Desa Pangkalan Jambi.

## 5. SARAN

Dalam kegiatan kolaborasi diharapkan seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab dapat memaksimalkan kinerja agar pengembangan ekowisata benar benar bisa berjalan. Peneliti menyarankan agar aktor dapat melakukan dialog tatap muka bersama seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi kinerja agar ekowisata dapat berjalan kembali. Lalu kelompok pengelola diharapkan dapat meningkatkan kemampuan serta konsisten memberikan keterbukaan informasi kepada seluruh pihak dengan cara membentuk ruang keterbukaan untuk setiap anggaran dan sumber dana yang sudah didapatkan maupun yang digunakan. Pemerintah, kelompok pengelola, dan CSR PT. Kilang Pertamina Internasional RU II Sungai Pakning peneliti menyarankan agar dapat melakukan kegiatan kolaborasi dengan terstruktur seperti membuat kegiatan diskusi yang berisi rancangan, bentuk pelaksanaan serta evaluasi bagi kemajuan ekowisata. Kegiatan diskusi tersebut harus terjadwal dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan tersebut untuk duduk secara formal minimal dalam sebulan 2 kali dan itu harus konsisten. Pada pertemuan itu pula komunikasi yang dijalankan harus baik agar tidak terjadi miskomunikasi, sehingga tercipta komunikasi dialog yang efektif. Selain itu pihak Pemerintah, Pertamina serta kelompok pengelola harus membuat visi misi yang jelas untuk kemajuan ekowisata. Dimana hal itu berpengaruh untuk setiap aktor dapat terlibat, bila ada dasar serta landasan yang kuat akan membuat pengembangan ekowisata terus berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Ali Yusri, Rico Purnawandi Pane, Syahroni Albi, & Adinda Moreta. (2022). Collaborative Governance Dalam Penerapan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PpkM) Di Kota Pekanbaru Tahun 2021. *Journal Publicuho*, 5(3), 802–814. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.32>
- [2]. Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- [3]. Aprilliya, A. D., Kamariyah, S., & Mustofa, A. (2023). *Kolaborasi antar aktor dalam Penanganan Peredaran Rokok Ilegal di Provinsi Jawa Timur*. 7, 501–512. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sap/article/view/7265>
- [4]. Creswell, John W & J. David Creswell. 2018. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition*. SAGE Publications, Inc.

- [5]. Dahlia, N. (2023). *Upaya Mewujudkan Good Governance Melalui Collaborative Governance dalam Pengelolaan BUMDes*. 5(1), 61–79.
- [6]. Dorisman, A., Suradji, A., & Setiawan, R. (2021). Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Collaboration Between Stakeholders In Traffic Accident Management. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19(1), 70 – 83. <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/download/7966/pdf>
- [7]. Feny Rita Fiantika dkk. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue Maret). <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAAJ&hl=en>
- [8]. Hermanto, W., Sujianto, & As'ari, H. (2023). Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 317–328.
- [9]. Ilhami, W. T. dkk (2021). *Desain Lanskap Terpadu Dan Mitigasi Risiko Bencana Pesisir Di Hutan Mangrove Pangkalan Jambi, Sei Pakning, Provinsi Riau Integrated Landscape Design and Coastal Disaster Risk Mitigation in Mangrove Forest of Pangkalan Jambi, Sei Pakning, Riau Province*. 5(1), 28–36. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/coj>;
- [10]. Purwanto, W. dkk. (2020). *Permata Hijau Pesisir Gambut* (D. S. Prawijaya, D. M. Haryanto, & R. Hidayat (eds.)). Arjuna Wijaya Karya.
- [11]. Riadhussyah, M., Syafii, S., & A. Nawir, A. (2021). *Kajian Akademik Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Batudulang, Kabupaten Sumbawa*. Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.
- [12]. Rusli, Z., Nasution, M. S., Mashur, D., Sciences, P., Riau, U., & Planning, R. (2024). *Policy Design For Peatland Management Based On Public-Private Desain Kebijakan Pengelolaan Lahan Gambut Berbasis Kemitraan Publik-Swasta*. 26(1), 97–105.
- [13]. Salsabila, E. (2022). Implementasi Kebijakan Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak. *JPASDEV Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 3(1), 382–396.
- [14]. Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. CV ALFABETA.
- [15]. Sunu, Retno, Hardi Warsono, R. A. (2020). Collaborative Governance dalam perspektif administrasi publik.
- [16]. Susi Iswanti, S. I., & Zulkarnaini, Z. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 92–103. [https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8\(1\).9307](https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).9307)
- [17]. Vojana, V., Maulana, D., & Yulianti, R. (2022). Kolaborasi Aktor Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kecamatan Kasemen Kota Serang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(2), 314–323. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v9i2.79>
- [18]. Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.
- [19]. Yanti, Dwi Indah Widya dkk (2022). *Mangrove, Bioekologi, Pengembangan Dan Perencanaan Strategi Ekowisata*.
- [20]. Yusri, Ali. Mashur fadli, dkk (2023). Collaborative Governance. In *Jurnal Sains dan Seni ITS* (Vol. 6, Issue 1).
- [21]. Zulkarnain *et al.* (2024). *Policy Design For Peatland Management Based On Public-Private Desain Kebijakan Pengelolaan Lahan Gambut Berbasis Kemitraan Publik-Swasta*. 26(1), 97–105